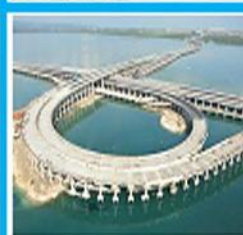
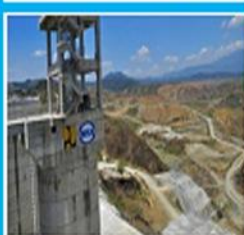




KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



TAHUN ANGGARAN 2015

AUDITED

Kementerian
PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang RI No.23 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-42/PB/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, April 2016
Sekretaris Jenderal

Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc
NIP. 19560818 198211 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Semester I Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.241.586.836.124 atau mencapai 122.68 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.012.016.359.100.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 adalah sebesar Rp109.454.332.938.826 atau mencapai 90.67 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp119.676.979.684.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2015.

Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp812.663.149.983.472 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp7.805.412.528.045; Aset Tetap (neto) sebesar Rp658.079.829.408.872; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp137.693.887.960; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp146.640.214.158.595.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp39.195.001.175 dan Rp812.663.149.983.472.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.297.811.561.140, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp53.454.295.500.903 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(52.156.483.939.763). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp(1.612.019.599.972) dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(53.768.503.539.735).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp736.676.006.534.506, ditambah Defisit-LO sebesar Rp(53.768.503.539.735), kemudian ditambah dengan penyesuaian nilai tahun berjalan, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan transaksi antar entitas senilai total Rp122.466.104.587.783, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp812.623.954.982.297.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2015		% thd Angg	TA 2014
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1,012,016,359,100	1,241,586,836,124	122.68	1,143,914,887,561
Hibah		-	-	0.00	-
JUMLAH PENDAPATAN		1,012,016,359,100	1,241,586,836,124	122.68	1,143,914,887,561
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	2,570,567,696,000	2,118,133,814,566	82.40	2,050,857,186,508
Belanja Barang	B.4	16,350,899,326,230	13,701,717,364,691	83.80	11,184,590,982,066
Belanja Bantuan Sosial	B.5	5,149,032,758,000	4,802,962,094,747	93.28	3,627,647,357,389
Jumlah Belanja Operasi		24,070,499,780,230	20,622,813,274,004	85.68	16,863,095,525,963
Belanja Modal					
Belanja Modal Tanah	B.6	6,392,585,501,000	5,620,614,452,724	87.92	1,665,084,280,099
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	1,756,446,831,770	1,562,301,630,629	88.95	794,881,107,059
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	4,765,468,881,000	4,386,512,169,011	92.05	1,645,580,321,274
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	82,374,827,519,000	76,972,785,615,248	93.44	51,629,714,857,270
Belanja Modal Lainnya	B.10	315,299,171,000	288,499,417,210	91.50	194,872,622,174
Belanja Modal BLU	B.11	1,852,000,000	806,380,000	43.54	861,042,700
Jumlah Belanja Modal		95,606,479,903,770	88,831,519,664,822	92.91	55,930,994,230,576
JUMLAH BELANJA		119,676,979,684,000	109,454,332,938,826	91.46	72,794,089,756,539

II. NERACA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-15	31-Des-14
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	5.002.777.870	584.183.433
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	40.621.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	20.554.769.201	57.337.633.335
Kas pada BLU	C.4	1.741.944.861.570	523.735.355.135
Belanja Dibayar di Muka	C.5	229.166.667	229.166.667
Pendapatan Yang masih harus diterima	C.6	4.792.936.037	-
Piutang PNB	C.7	99.327.073.946	58.331.089.259
<i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak</i>	<i>C.11</i>	<i>(25.719.769.494)</i>	<i>(288.961.020)</i>
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.8	1.414.297.000	
<i>Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran</i>	<i>C.11</i>	<i>(7.071.485)</i>	
Bagian Lancar TP/TGR	C.9	619.484.085	424.040.061
<i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bag.Lancar TP/TGR</i>	<i>C.11</i>	<i>(325.069.129)</i>	<i>(147.000.296)</i>
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.10	545.184.525.413	315.455.351.611
<i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Keg. Op. BLU</i>	<i>C.11</i>	<i>(443.928.042.353)</i>	<i>(251.494.170.516)</i>
Persediaan	C.12	5.856.322.588.717	534.844.970.397
Jumlah Aset Lancar		7.805.412.528.045	1.239.052.279.066
ASET TETAP			
Tanah	C.13	286.968.961.424.845	278.480.885.585.939
Peralatan dan Mesin	C.14	9.329.579.493.745	7.591.103.938.282
Gedung dan Bangunan	C.15	14.177.437.785.676	9.319.173.070.639
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16	434.873.852.636.153	369.351.525.506.003
Aset Tetap Lainnya	C.17	46.790.085.898.164	36.920.836.642.547
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.18	37.505.239.035.744	33.543.670.139.268
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(171.565.326.865.455)	(137.150.334.266.962)
Jumlah Aset Tetap		658.079.829.408.872	598.056.860.615.716
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.20	138.227.826.546	
<i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran</i>	<i>C.22</i>	<i>(691.139.133)</i>	
Piutang Tagihan TP/TGR	C.21	328.327.707	610.983.244
<i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang</i>	<i>C.22</i>	<i>(171.127.160)</i>	<i>(174.865.120)</i>
Jumlah Piutang Jangka Panjang		137.693.887.960	436.118.124
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.23	133.541.579.113.010	131.941.959.113.010
Aset Tidak Berwujud	C.24	6.194.191.615.930	5.110.211.396.598
Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.25	25.651.670.613	23.937.005.503
Aset Lain-Lain	C.26	7.797.368.596.159	717.506.051.742
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.27	(918.576.837.117)	(350.608.212.020)
Jumlah Aset Lainnya		146.640.214.158.595	137.443.005.354.833
JUMLAH ASET		812.663.149.983.472	736.739.354.367.739
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.28	29.347.637.178	60.208.779.300
Pendapatan Yang Ditangguhkan			62.621.220
Pendapatan Diterima di Muka	C.29	4.595.157.697	2.554.870.500
Uang Muka dari KPPN	C.30	5.002.777.870	584.183.433
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.31	249.428.430	-
JUMLAH KEWAJIBAN		39.195.001.175	63.410.454.453
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar			1.175.641.824.613
Ekuitas Dana Investasi			735.500.302.088.673
Ekuitas	C.32	812.623.954.982.297	
JUMLAH EKUITAS		812.623.954.982.297	736.675.943.913.286
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		812.663.149.983.472	736.739.354.367.739

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.297.811.561.140	-
Pendapatan Hibah	D.2	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		1.297.811.561.140	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.3	2.122.414.580.273	-
Beban Persediaan	D.4	2.917.552.195.812	-
Beban Barang dan Jasa	D.5	6.284.530.864.435	-
Beban Pemeliharaan	D.6	3.944.443.809.211	-
Beban Perjalanan Dinas	D.7	1.666.795.558.064	-
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	45.241.065.568	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	4.802.962.694.747	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	31.420.676.250.139	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	249.678.481.654	-
Beban Lain-lain	D.12	-	-
JUMLAH BEBAN		53.454.295.499.903	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(52.156.483.938.763)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Nonlancar		164.698.467.548	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		1.903.413.233.590	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		127.158.535.955	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		463.369.885	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.13	(1.612.019.599.972)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(53.768.503.538.735)	-
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(53.768.503.538.735)	-

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
EKUITAS AWAL	E.1	736.676.006.534.506	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(53.768.503.539.735)	-
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN		4.731.516.890.446	
Penyesuaian Nilai Aset		4.731.516.890.446	
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		2.518.830.509.297	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	79.800.260.345	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4	6.728.352.920.349	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.5	(2.370.680.899.023)	-
LAIN-LAIN	E.6	(1.918.641.772.374)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		122.466.104.587.783	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		75.947.948.447.791	-
EKUITAS AKHIR	E.7	812.623.954.982.297	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

*Dasar Hukum
Entitas*

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 265/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

*Rencana
Strategis*

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

VISI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Terwujudnya infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

MISI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

- Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian

ekonomi

- Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
- Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua'.
- Mempercepat pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara terpadu dari pinggiran untuk mendukung keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
- Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

TUJUAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

- Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan dalam mendukung keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI.
- Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energy guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

- Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritime.
- Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua'.
- Menyelenggarakan tata kelola pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat dan mandiri, dan berkepribadian.

STRATEGI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan dalam mendukung keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan.
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua'.
5. Menyelenggarakan tata kelola pembangunan bidang pekerjaan

umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat dan mandiri, dan berkepribadian.

KEBIJAKAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Kebijakan Utama Pembangunan Wilayah Nasional.

kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah.

2. Kebijakan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Untuk meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antarsektor dan antartingkat pemerintahan, arah kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah menterpadukan perencanaan, pemrograman dan penganggaran pembangunan infrastruktur wilayah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat baik antarsektor, antarwilayah, antartingkat pemerintahan, maupun fungsi, lokasi, waktu, besaran serta anggaran; menterpadukan pembangunan infrastruktur wilayah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dengan pengembangan berbagai kawasan strategis; serta menterpadukan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan berbagai kawasan di dalam perkotaan/metropolitan sehingga menjadi kawasan yang hijau, cerdas dan berkelanjutan, serta memiliki keterkaitan dengan pengembangan kawasan perdesaan seperti agropolitan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk diperbandingkan dengan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya

ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai

atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama Kali*

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan
Rp1.241.586.836.124

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp1.241.586.836.124 atau mencapai 122,68 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.012.016.359.100. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2015

Kode	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
	Pendapatan Sumber Daya Alam		1,402,545	-
4212	Pendapatan Gas Bumi	-	1,402,545	-
	Pendapatan PNBP Lainnya	246,683,372,100	631,360,348,848	255.94%
4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan	218,906,651,500	48,521,110,845	22.17%
4232	Pendapatan Jasa	27,776,720,600	262,266,400,520	944.19%
4235	Pendapatan Pendidikan	-	141,640,000	-
4237	Pendapatan Iuran dan Denda	-	61,908,568,369	-
4239	Pendapatan Lain-lain	-	258,522,629,114	-
	Pendapatan BLU	765,332,987,000	610,225,084,731	79.73%
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	640,925,544,000	551,215,316,115	86.00%
4249	Pendapatan BLU Lainnya	124,407,443,000	59,009,768,616	47.43%
	JUMLAH	1,012,016,359,100	1,241,586,836,124	122.68%

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar terdapat pada Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp.497.912.424.529 yang merupakan Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral Satker BLU Bidang Pendanaan BPJT.

Realisasi PNBP terendah sebesar Rp1.402.545,- adalah pada Direktorat Jenderal Cipta Karya yang merupakan Pendapatan Gas Bumi Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Banten. Yang dibukukan sesuai instruksi KPPN Jakarta V (139) berdasarkan hasil rekonsiliasi.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2015 dan 2014

Kode	Uraian	TA 2015 (Rp)	TA 2014 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
				(Rp)	%
	Pendapatan Sumber Daya Alam	1,402,545	-	1,402,545	100.00%
4212	Pendapatan Gas Bumi	1,402,545	-	1,402,545	100.00%
	Pendapatan PNBP Lainnya	631,360,348,848	608,026,431,028	23,333,917,820	3.84%
4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan	48,521,110,845	37,437,533,640	11,083,577,205	29.61%
4232	Pendapatan Jasa	262,266,400,520	264,768,954,532	(2,502,554,012)	-0.95%
4235	Pendapatan Pendidikan	141,640,000	120,007,500	21,632,500	18.03%
4237	Pendapatan Iuran dan Denda	61,908,568,369	66,590,980,694	(4,682,412,325)	-7.03%
4239	Pendapatan Lain-lain	258,522,629,114	239,108,954,662	19,413,674,452	8.12%
	Pendapatan BLU	610,225,084,731	535,888,456,533	74,336,628,198	13.87%
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	551,215,316,115	535,888,456,533	15,326,859,582	2.86%
4249	Pendapatan BLU Lainnya	59,009,768,616	-	334,500	100.00%
	JUMLAH	1,241,586,836,124	1,143,914,887,561	97,671,948,563	8.54%

Realisasi Pendapatan untuk Tahun Anggaran 2015 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2014 terdapat kenaikan sebesar Rp8,54%. Hal ini disebabkan karena terjadi kenaikan realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar Rp15.326.859.582 dan Pendapatan Lain-lain sebesar Rp19.413.674.582. Pendapatan BLU bertambah juga disebabkan bergabungnya BLU ex Kementerian Perumahan Rakyat yaitu Pusat Pembiayaan Perumahan (499686) dibawah Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

Realisasi Belanja
Rp 109.454.332.938.826 ,-

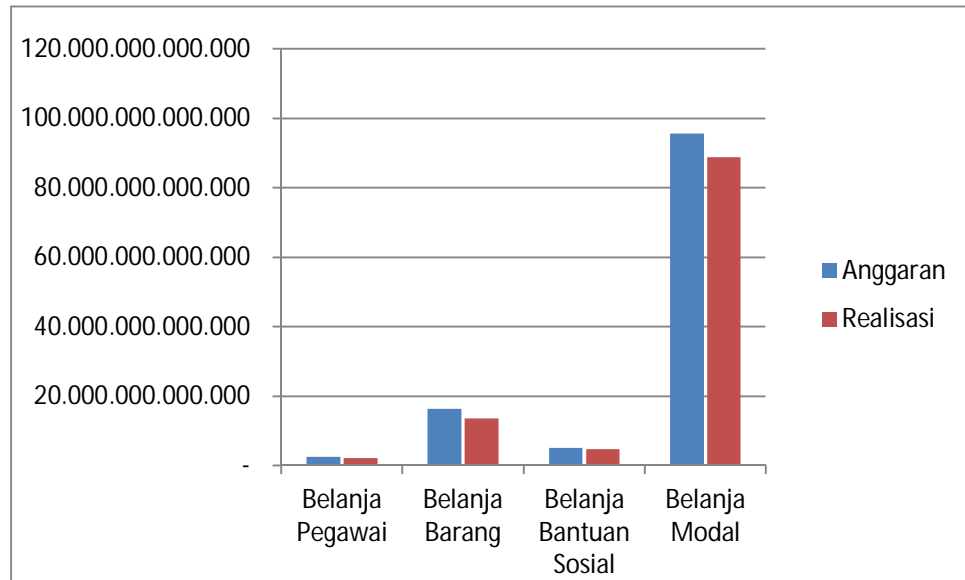
B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp109.454.332.938.826 atau 91.64% dari anggaran belanja sebesar Rp119.676.979.684.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2015 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2015

Uraian	Tahun Anggaran 2015		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2,570,608,721,000	2,124,266,654,755	82.64
Belanja Barang	16,356,208,998,230	13,718,382,808,618	83.87
Belanja Bantuan Sosial	5,149,032,758,000	4,850,132,604,494	94.20
Belanja Modal	95,612,342,354,770	88,981,569,877,291	93.06
Total Belanja Kotor	119,688,192,832,000	109,674,351,945,158	91.63
Pengembalian Belanja	-	220,019,006,332	
Total Belanja	119,688,192,832,000	109,454,332,938,826	91.45

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

**Laporan Keuangan Kementerian PUPR BA 033
TA 2015 Audited**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR	295,844,409,000	232,015,438,217	78.42
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR	361,011,680,000	295,623,437,352	81.89
3.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR	105,200,000,000	83,297,409,796	79.18
4.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	20,376,115,000	20,367,244,531	99.96
5.	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR	521,407,149,000	493,276,213,234	94.60
6.	Program Pembinaan Konstruksi	722,899,986,000	579,662,469,688	80.19
7.	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	19,798,069,562,000	18,548,255,707,201	93.69
8.	Program Penyelenggaraan Jalan	57,393,996,686,000	53,261,310,323,878	92.80
9.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	31,101,849,793,000	28,457,900,763,722	91.50
10.	Program Pengembangan Perumahan	7,735,204,543,000	6,650,404,005,860	85.98
11.	Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	558,877,866,000	103,239,846,468	18.47
12.	Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	525,000,000,000	364,006,119,093	69.33
13.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	537,241,895,000	364,973,959,786	67.93
JUMLAH		119,676,979,684,000	109,454,332,938,826	91.46

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014

URAIAN	Realisasi TA 2015	Realisasi TA 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2,118,133,814,566	2,050,857,186,508	3.28
Belanja Barang	13,701,717,364,691	11,126,630,133,989	23.14
Belanja Bantuan Sosial	4,802,962,094,747	3,627,647,357,389	32.40
Belanja Modal	88,831,519,664,822	55,930,994,230,576	58.82
Jumlah	109,454,332,938,826	72,736,128,908,462	50.48

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2015 mengalami kenaikan sebesar (50.48) persen dibandingkan pada TA 2014. Hal ini disebabkan karena pada tahun anggaran 2015 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat tambahan anggaran yang sangat signifikan pada belanja modal, yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dikawasan perbatasan, pembangunan irigasi, pengembangan permukiman serta peningkatan kemandapan jalan nasional.

Belanja Pegawai
Rp2.118.133.814.566

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014 adalah masing-masing sebesar Rp2.118.133.814.566 dan Rp2.050.857.186.508 atau terjadi kenaikan sebesar 3.28%. Kenaikan ini disebabkan oleh antara lain karena adanya kenaikan Belanja Belanja Gaji

Pokok PNS dan Belanja Uang Makan PNS masing-masing sebesar Rp127.890.196.530 dan Rp38.116.267.477.

Rincian Belanja Pegawai disajikan dalam tabel berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2015	Tahun Anggaran 2014	Naik/(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 872,506,586,992	Rp 744,616,390,462	Rp 127,890,196,530	17.18%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 18,547,529	Rp 15,655,000	Rp 2,892,529	18.48%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	Rp 62,944,955,412	Rp 54,908,458,022	Rp 8,036,497,390	14.64%
Belanja Tunj. Anak PNS	Rp 17,325,346,409	Rp 15,505,792,470	Rp 1,819,553,939	11.73%
Belanja Tunj. Struktural PNS	Rp 16,712,020,000	Rp 15,079,115,000	Rp 1,632,905,000	10.83%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	Rp 14,655,000,000	Rp 12,247,130,000	Rp 2,407,870,000	19.66%
Belanja Tunj. PPH PNS	Rp 35,817,969,109	Rp 15,082,035,161	Rp 20,735,933,948	137.49%
Belanj Tunj. Beras PNS	Rp 52,363,503,030	Rp 46,496,871,170	Rp 5,866,631,860	12.62%
Belanja Tunj. Lauk Pauk PNS	Rp 93,442,000	Rp 76,848,000	Rp 16,594,000	21.59%
Belanja Uang Makan PNS	Rp 142,707,295,196	Rp 104,591,027,719	Rp 38,116,267,477	36.44%
Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	Rp 25,580,704,412	Rp 1,256,146,554	Rp 24,324,557,858	1936.44%
Belanja Tunj. Khusus Papua PNS	Rp 1,892,745,000	Rp 1,705,225,000	Rp 187,520,000	11.00%
Belanja Tunj. Lain-Lain termasuk Uang Duka PNS dalam dan luar negeri	Rp 354,350,100	Rp 570,396,600	Rp (216,046,500)	-37.88%
Belanja Tunjangan Umum PNS	Rp 44,293,425,000	Rp 41,241,001,000	Rp 3,052,424,000	7.40%
Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	Rp 12,950,000	Rp -	Rp -	100.00%
Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	Rp -	Rp 80,121,000	Rp (80,121,000)	-100.00%
Belanja Gaji Pokok TNI/Polri	Rp -	Rp -	Rp -	100.00%
Belanja Tunj. Lain-lain termasuk Uang Duka Pejabat Negara	Rp 34,765,200	Rp -	Rp 34,765,200	100.00%
Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	Rp 18,795,069,600	Rp 23,695,872,800	Rp (4,900,803,200)	-20.68%
Belanja Tunj. Pegawai Non PNS	Rp 419,042,500	Rp 2,903,297,500	Rp (2,484,255,000)	-85.57%
Belanja Tunj. Lainnya Non PNS	Rp -	Rp -	Rp -	0.00%
Belanja Uang Honor tetap	Rp 92,387,862,800	Rp 163,243,643,002	Rp (70,855,780,202)	-43.40%
Belanja Uang Lembur	Rp 54,974,866,500	Rp 55,976,408,377	Rp (1,001,541,877)	-1.79%
Belanja Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan)	Rp 670,108,532,432	Rp 754,279,499,520	Rp (84,170,967,088)	-11.16%
Belanja Pegawai Transito	Rp 267,675,534	Rp -	Rp 267,675,534	100.00%
Realisasi B. Pegawai Bruto	Rp 2,124,266,654,755	Rp 2,053,570,934,357	Rp 70,415,094,864	3.44%
Pengembalian Belanja Pegawai	(6,132,840,189)	(2,713,747,849)	Rp (3,419,092,340)	125.99%
Realisasi B. Pegawai Netto	Rp 2,118,133,814,566	Rp 2,050,857,186,508	Rp 66,996,002,524	3.28%

Kenaikan prosentase terbesar adalah kenaikan Tunjangan Kompensasi Kerja (511134) menjadi Rp. 25.580.74.412 yang terdiri dari Ditjen Cipta Karya Rp. 20.332.115.191 dan Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp. 5.186.460.696

Belanja Barang

Rp

13.701.717.364.691,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014 adalah masing-masing sebesar Rp13.701.717.364.691 dan Rp11.126.630.133.989. Realisasi Belanja Barang TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 23,14 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain karena terjadi kenaikan signifikan pada Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp1.241.200.318.781, dengan realisasi terbesar terdapat pada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sebesar Rp1.211.973.741.361 yang merupakan belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Uraian	Tahun Anggaran 2015	Tahun Anggaran 2014	Naik/(Turun)	%
Belanja Barang Operasional	Rp 694,922,462,623	Rp 517,494,322,990	Rp 177,428,139,633	34.29%
Belanja Barang Non Operasional	Rp 1,947,891,852,858	Rp 1,982,103,564,444	Rp (34,211,711,586)	-1.73%
Belanja Barang Persediaan	Rp 239,618,484,283	Rp -	Rp 239,618,484,283	100.00%
Belanja Jasa	Rp 3,747,957,452,684	Rp 3,208,302,257,089	Rp 539,655,195,595	16.82%
Belanja Pemeliharaan	Rp 3,908,808,383,841	Rp 3,534,472,896,200	Rp 374,335,487,641	10.59%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp 1,661,757,478,557	Rp 1,688,637,477,757	Rp (26,879,999,200)	-1.59%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	Rp 13,992,107,948	Rp 20,220,311,547	Rp (6,228,203,599)	-30.80%
Belanja Barang BLU	Rp 30,329,435,346	Rp 11,270,914,809	Rp 19,058,520,537	169.09%
Belanja Barang utk diserahkan kepada masyarakat/pemda	Rp 1,411,146,288,078	Rp 169,945,969,297	Rp 1,241,200,318,781	730.35%
Belanja Barang Penunjang Dana DK/TP utk diserahkan kepada Pemda	Rp 393,757,000	Rp 3,076,672,550	Rp (2,682,915,550)	-87.20%
Belanja Barang lainnya utk diserahkan kepada masyarakat/pemda	Rp 61,565,105,400	Rp 974,353,560	Rp 60,590,751,840	6218.56%
Realisasi B. Barang Bruto	Rp 13,718,382,808,618	Rp 11,136,498,740,243	Rp 2,581,884,068,375	23.18%
Pengembalian Belanja Barang	Rp (16,665,443,927)	Rp (9,868,606,254)	Rp (6,796,837,673)	68.87%
Realiasi B.Barang Netto	Rp 13,701,717,364,691	Rp 11,126,630,133,989	Rp 2,575,087,230,702	23.14%

Kenaikan persentase terbesar terdapat pada Belanja Lainnya Untuk Diserahkan ke Masyarakat/Pemda sebesar Rp. 60.590.751.840 yang sebagian besar berada pada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sebesar Rp.40.053.750.000

Belanja Bantuan
Sosial Rp
4.802.962.094.747

B.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 4.802.962.094.747,- dan Rp3.627.647.357.389. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk menghindari terjadinya resiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Belanja Bantuan Sosial untuk Tahun Anggaran 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2015	Tahun Anggaran 2014	Naik/Turun (Rp)	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	Rp -	Rp 14,352,860,000	Rp (14,352,860,000)	-100.00%
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	Rp 747,042,954,400	Rp 2,800,000,000	Rp 744,242,954,400	26580.11%
Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	Rp 4,067,709,242,094	Rp 3,597,871,790,389	Rp 469,837,451,705	13.06%
Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial	Rp 35,380,408,000	Rp 800,000,000	Rp 34,580,408,000	4322.55%
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	Rp -	Rp 1,353,750,000	Rp (1,353,750,000)	-100.00%
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana	Rp -	Rp 10,888,429,000	Rp (10,888,429,000)	-100.00%
Realisasi B. Modal Bruto	Rp 4,850,132,604,494	Rp 3,628,066,829,389	Rp 492,175,680,705	13.57%
Pengembalian Belanja	Rp (47,170,509,747)	Rp (419,472,000)	Rp (46,751,037,747)	0.00%
Realisasi B. Modal Netto	Rp 4,802,962,094,747	Rp 3,627,647,357,389	Rp 1,175,314,737,358	32.40%

Terdapat kenaikan realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.175.314.737.358,- atau naik sebesar 32.40% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kenaikan belanja bantuan sosial untuk perlindungan sosial yang merupakan realisasi belanja pada Direktorat Jenderal Cipta Karya serta kenaikan belanja bantuan sosial untuk jaminan sosial pada Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Belanja Modal
Tanah Rp
5.620.614.452.724,-

B.6 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014 adalah masing-masing sebesar Rp5.620.614.452.724,- dan Rp1.665.084.280.099. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal tanah adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BELANJA	Tahun Anggaran 2015	Tahun Anggaran 2014	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	4,724,551,434,809	1,467,992,861,806	221.84
Belanja Modal Pembebasan Tanah	939,317,095,805	182,509,473,280	414.67
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	40,915,318,420	14,761,527,494	177.18
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	7,683,748,700	3,016,544,568	154.72
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	680,002,000	-	100.00
Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	11,020,495,261	5,214,099,772	111.36
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	35,285,025,292	12,900,039,586	173.53
Jumlah Belanja Kotor	5,759,453,120,287	1,686,394,546,506	241.52
Pengembalian Belanja Modal	(138,838,667,563)	(21,310,266,407)	551.51
Jumlah Belanja	5,620,614,452,724	1,665,084,280,099	237.56

Terdapat kenaikan realisasi belanja modal tanah sebesar 237,56% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebagian besar disebabkan kenaikan belanja modal tanah dan belanja modal pembebasan tanah. Realisasi belanja modal tanah terbesar terdapat pada Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp4.454.865.988.691 dan realisasi belanja modal pembebasan tanah terbesar terdapat pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar Rp717.996.472.008.

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp1.562.301.630.6
29*

B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.562.301.630.629 dan Rp794.881.107.059. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014

URAIAN	Tahun Anggaran 2015	Tahun Anggaran 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,551,718,936,517	786,563,412,119	97.28
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	156,057,625	4,759,209,850	-96.72
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	454,140,000	407,670,000	11.40
Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin	1,537,880,848	68,345,000	2150.17
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	452,916,000	591,975,965	-23.49
Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin	-	14,480,000	-100.00
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	876,624,700	916,442,212	-4.34
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	1,365,408,889	560,851,213	143.45
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	5,795,272,000	1,003,091,000	477.74
Jumlah Belanja Kotor	1,562,357,236,579	794,885,477,359	96.55
Pengembalian	(55,605,950)	(4,370,300)	0.00
Jumlah Belanja	1,562,301,630,629	794,881,107,059	96.55

Terdapat kenaikan realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar 96,55% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebagian besar disebabkan kenaikan belanja modal peralatan dan mesin serta belanja penambahan nilai peralatan dan mesin. Selain itu pada tahun 2015 terdapat kenaikan anggaran belanja modal peralatan mesin menjadi Rp1.756.446.931.770,- dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp843.414.633.000,-

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp4.386.512.169.0
11*

B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014 adalah masing-masing sebesar Rp4.386.512.169.011 dan Rp1.646.580.321.274. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2015
dan Tahun Anggaran 2014*

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2015	TA 2014	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,269,853,527,123	1,600,598,593,646	166.77
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	454,714,500	1,381,984,888	-67.10
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	1,215,579,000	966,011,500	25.83
Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan	596,092,244	-	100.00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	9,183,344,644	3,293,015,200	178.87
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	113,661,500	18,708,500	100.00
Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan	4,627,183,520	-	100.00
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	898,735,300	275,711,800	225.97
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	99,571,418,830	40,362,335,402	146.69
Jumlah Belanja Kotor	4,386,514,256,661	1,646,896,360,936	166.35
Pengembalian Belanja Modal	(2,087,650)	(1,316,039,662)	0.00
Jumlah Belanja	4,386,512,169,011	1,645,580,321,274	166.56

Terdapat kenaikan realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar 166,56% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebagian besar disebabkan kenaikan belanja modal gedung dan bangunan. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang terbesar terdapat pada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sebesar Rp3.678.692.577.535,-

B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014 adalah masing-masing sebesar Rp76.972.785.615.248 dan Rp51.629.714.857.270. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah sebagai berikut:

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Rp
76.972.785.615.248
,-*

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2015	TA 2014	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	45,554,291,227,178	32,017,325,483,685	42.28
Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan	158,764,732,050	76,874,120,839	106.53
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan	11,292,753,095	9,880,594,000	14.29
Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan	2,661,776,125	1,571,534,000	69.37
Belanja Modal Perancangan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	1,585,612,030,991	1,119,218,229,708	41.67
Belanja Modal Perizinan Jalan dan Jembatan	27,755,418,500	914,973,000	2933.47
Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan	14,835,870,848	7,480,526,206	98.33
Belanja Modal Irigasi	5,519,609,904,708	2,567,631,837,381	114.97
Belanja Modal Bahan Baku Irigasi	24,119,544,534	20,220,162,371	19.28
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi	17,894,988,540	14,070,865,500	27.18
Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi	3,403,591,640	2,118,468,775	60.66
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi	6,202,017,660	3,623,691,730	71.15
Belanja Modal Perijinan Irigasi	896,545,000	-	100.00
Belanja Modal Perjalanan Irigasi	33,412,299,228	22,944,607,747	45.62
Belanja Modal Jaringan	22,684,555,885,632	14,880,091,054,278	52.45
Belanja Modal Bahan Baku Jaringan	63,790,501,563	43,493,481,290	46.67
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	52,802,025,453	31,652,393,388	66.82
Belanja Modal Sewa Peralatan Jaringan	10,397,528,252	4,168,604,525	149.42
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan	305,601,892,910	227,225,651,733	34.49
Belanja Modal Perizinan Jaringan	2,206,799,000	198,275,000	100.00
Belanja Modal Perjalanan Jaringan	103,888,643,757	70,977,523,835	46.37
Belanja Modal Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	-	174,088,080,666	-100.00
Belanja Modal Penambahan Nilai Irigasi	571,852,261,245	220,640,572,137	159.18
Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan	226,662,950,100	134,901,898,215	68.02
Jumlah Belanja Kotor	76,982,511,188,009	51,651,312,630,009	49.04
Pengembalian Belanja Modal	(9,725,572,761)	(21,597,772,739)	-54.97
Jumlah Belanja	76,972,785,615,248	51,629,714,857,270	49.09

Terdapat kenaikan realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebesar 49,09% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebagian besar disebabkan kenaikan belanja modal jalan dan jembatan serta belanja modal jaringan. Selain itu pada tahun 2015 terdapat kenaikan anggaran belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan menjadi Rp82.374.827.519.000 dari anggaran sebelumnya sebesar Rp53.967.113.806.000

Belanja Modal
Lainnya
Rp288.499.417.210

B.10 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014 adalah masing-masing sebesar Rp288.499.417.210 dan Rp194.872.622.174. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal lainnya adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2015	TA 2014	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	289,927,695,755	194,089,865,674	49.38
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	-	797,411,000	-100.00
Jumlah Belanja Kotor	289,927,695,755	194,887,276,674	48.77
Pengembalian Belanja Modal	(1,428,278,545)	(14,654,500)	9646.35
Jumlah Belanja	288,499,417,210	194,872,622,174	48.05

Terdapat kenaikan realisasi belanja modal lainnya sebesar 48,05% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi belanja modal lainnya terbesar terdapat pada Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar Rp134.345.573.807,-

Belanja Modal BLU
Rp806.380.000

B.11 Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU untuk Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014 adalah masing-masing sebesar Rp806.380.000 dan Rp861.042.700. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal lainnya adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2015	TA 2014	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	806.380.000	861.042.700	-6,35
Jumlah Belanja Kotor	806.380.000	861.042.700	-6,35
Pengembalian Belanja Modal	-	-	
Jumlah Belanja	806.380.000	861.042.700	-6,35

Terjadi penurunan realisasi belanja modal lainnya sebesar -6,35% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.